

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Akuntansi Dan Standar Akuntansi	5
1. Akuntansi	5
2. Akuntansi Sektor Publik	6
3. Standar Akuntansi	7
4. Standar Akuntansi Pemerintahan	8
5. Prosedur Akuntansi Pemerintahan Daerah	8
6. Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrua.....	9
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	11
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.	15
9. Laporan Keuangan	17
2.2 Definisi Konsepsional.....	18
2.3 Fokus Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
3.3 Sumber Data	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data	21
3.5 Teknik Analisis Data	22
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
4.1 Gambaran Umum	23
1. Sejarah.....	23
2. Struktur Organisasi	25

3.	Klasifikasi Karyawan	28
4.	Visi, Misi dan Tujuan.....	29
4.2	Pengakuan Dan Pengukuran Transaksi	30
1.	Pendapatan Asli Daerah	30
2.	Pendapatan Transfer.....	31
3.	Pendapatan Lain-lain Yang Sah.....	31
4.	Belanja Modal	32
5.	Belanja Operasi	33
6.	Belanja Tak Terduga.....	33
7.	Transfer	34
8.	Utang.....	35
9.	Beban	36
10.	Aset Tetap	36
4.3	Penyajian Laporan Keuangan	37
1.	Laporan Realisasi Anggaran	37
2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	39
3.	Neraca	40
4.	Laporan Operasional	43
5.	Laporan Arus Kas	45
6.	Laporan Perubahan Ekuitas	49
4.4	Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	50
1.	Pendapatan Asli Daerah	50
2.	Pendapatan Transfer.....	50
3.	Pendapatan Lain-lain Yang Sah.....	51
4.	Belanja Modal	51
5.	Belanja Operasi	52
6.	Belanja Tak Terduga.....	52
7.	Transfer	52
8.	Utang.....	53
9.	Beban	53
10.	Aset Tetap	54
11.	Penyajian Laporan Keuangan	54
BAB V	Kesimpulan Dan Rekomendasi	
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Rekomendasi	56
	DAFTAR PUSTAKA	57
	LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk menghadapi perkembangan dunia saat ini, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar dapat mengukur sejauh mana perekonomian Indonesia untuk dapat bersaing di dunia. Khususnya di Indonesia dengan munculnya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah, maka pemerintah pusat menerbitkan peraturan – peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengharuskan pemerintah daerah memperhatikan kebijakan-kebijakan SAP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah karena melalui otonomi daerah ini, kebijakan pemerintah pusat dalam berbagai bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan perkembangan-perkembangan yang menuntut daya saing di setiap negara, juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah, karena Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah dan siap untuk dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diperjelas dengan munculnya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang NO.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang NO.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas menuju Akrua

yang disempurnakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang menyajikan tujuh laporan keuangan dan membedakan pengakuan akan transaksi yang terjadi dalam satu periode. Standar Akuntansi Pemerintah ini merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintahan yang disusun dalam bentuk prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Akuntansi Berbasis AkruaI sendiri merupakan konsep yang sangat populer digunakan di sektor swasta, karena akuntansi berbasis akruaI dianggap memberikan benefit yang besar kepada penggunanya. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintah ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah daerah melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Adapun manfaat bagi pemerintah daerah apabila menerapkan standar akuntansi keuangan berbasis akruaI yaitu dapat memberikan informasi tentang kewajiban dan hak yang akan diterima di masa depan sehingga keputusan ekonomi dapat diambil lebih baik. Selain itu, jika pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan SAP yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka akan mempermudah BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan, dan dapat berpengaruh dalam mendapatkan opini WTP dari BPK tetapi juga tidak menutup kemungkinan mendapatkan opini lainnya apabila memang terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Apabila dalam pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan standar yang ada, maka akan mengakibatkan kerugian bagi daerah, potensi kekurangan bagi daerah, kekurangan penerimaan, ketidak hematatan dan ketidak aktifan sampai pada kecurigaan BPK sehingga dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tidak mendapatkan WTP yang akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang laporan keuangan berbasis akrual, standar akuntansi tersebut belum langsung dapat diterapkan oleh seluruh lembaga pemerintahan karena masih banyak hambatan dan permasalahan dalam menyelenggarakan standar akuntansi tersebut antara lain: belum siapnya sumber daya manusia yang dimiliki, dan belum tersediannya sistem yang dapat mendukung penerapan standar akuntansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan pembenahan selama beberapa tahun untuk memperbaiki segala kebutuhan dengan mempertimbangkan beberapa solusi sehingga hambatan dan permasalahan dapat diselesaikan. Selanjutnya pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan melalui Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual yang harus diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan Permendagri tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado yang merupakan instansi pemerintah yang pada dasarnya mengelola keuangan dan asset daerah ditugaskan untuk dapat melaporkan mengenai keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan daerah berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni berbasis akrual.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti dengan mengangkat judul Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus BPK-BMD Kota Manado).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di BPK-BMD Kota Manado dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pencatatan transaksi yang terjadi di BPK-BMD Kota Manado?

Berdasarkan rumusan masalah maka penulis menggunakan batasan masalah yaitu:

1. Laporan keuangan yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan yang terbatas yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado.

2. Laporan Keuangan yang diteliti yaitu laporan keuangan tahun anggaran 2015.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di BPK-BMD Kota Manado dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Untuk mengetahui pencatatan transaksi yang terjadi di BPK-BMD Kota Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi, dapat digunakan untuk menambah informasi dan dapat dijadikan masukan serta evaluasi dalam penyelenggaraan laporan keuangan pemerintahan yang menggunakan basis akrua.
2. Bagi Politeknik, dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kurikulum di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado.
3. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlakuan standar akuntansi khususnya standar akuntansi pemerintahan dan untuk dapat membuat Tugas Akhir yang merupakan satu syarat dalam menyelesaikan studi diploma empat akuntansi keuangan.